

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dunia sedang berada dalam era globalisasi, dalam hal ini globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses mendunianya berbagai aspek kehidupan manusia. Maka dari itu kesempatan terbuka lebar bagi setiap warga Negara untuk memperoleh hak yang sama dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, untuk mencapai tujuan masyarakat yang cerdas maka harus dibentuk masyarakat belajar. UU No.20 tahun 2003 pada Pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Upaya pengembangan pendidikan dalam laju pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah pada saat ini, dengan pesatnya persaingan global, Indonesia ‘dipaksa’ untuk secepat mungkin mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai keunggulan dan daya saing. Dasar pemikirannya adalah pertumbuhan di segala sektor terutama pendidikan dan ekonomi sebagai penggerak utama pembangunan bangsa. Sesungguhnya pendidikan menjadi hal yang mendasar dalam merubah dan mengembangkan kualitas SDM. Menurut UNESCO (dalam FIP, 2007, hlm. 19) *”Education as organized and sustained communication designed to bring about learning”* (pendidikan adalah komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dilanjutkan untuk menumbuhkan belajar). Atas dasar pengertian tersebut maka tujuan utama komunikasi yang terorganisir dan berkelanjutan itu adalah timbulnya kegiatan belajar. Pendidikan itu sendiri tidak hanya sebatas pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan non-formal seperti kursus, pelatihan dan pendidikan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat serta pendidikan informal di keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 mengenai Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari tiga jalur pendidikan, yaitu jalur formal, jalur

nonformal, dan jalur informal. Coombs (dalam Sudjana, 2010, hlm. 21) membedakan pengertian ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut:

1. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.
2. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media masa.
3. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan merupakan dorongan utama dalam peningkatan SDM menuju pembangunan bangsa. Hak dan kewajiban dalam pembangunan pun dimiliki oleh perempuan, baik pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial maupun di dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan selalu hadir dalam setiap laju perkembangan Negara, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, perempuan pada masa itu ikut berperan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini, seperti R.A Kartini, Fatmawati, Dewi Sartika. Perjuangan mereka menjadi cermin kebangkitan semangat perempuan agar ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran perempuan semakin maju pesat terbukti dengan pernah terpilihnya seorang perempuan sebagai presiden Republik Indonesia. Perempuan tidak lagi ragu untuk maju ke ruang publik dan menduduki posisi strategis, karena mereka juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan masyarakat Indonesia kepada kehidupan makmur dan sejahtera. Salah satunya dengan kehadiran perempuan dalam pembangunan bangsa di lingkup sosial dan kemandirian ekonomi melalui pendidikan di masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam memecahkan berbagai tantangan kebangsaan yang sedang dihadapi bersama. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun

Choirunnisa Awaliyah, 2015

PERAN KADER PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 16 menyebutkan bahwa “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.” Hal ini tercermin dalam program yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program yang terselenggara di dasarkan pada prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kelurahan adalah PKK. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan (PKK) merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan, dari keluarga yang sejahtera ini maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman dan kedamaian. Maka dari itu, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan.

Menurut Pemendagri Nomor 5 tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuh-kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, sebagai pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan merupakan terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster

Choirunnisa Awaliyah, 2015

**PERAN KADER PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan Oxford English Dictionary (dalam Guntur, 2009, hlm. 3), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power atau authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Pengertian lain dari pemberdayaan adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. Berdaya adalah memberi kekuatan atau tenaga agar tampil lebih mandiri. (Nugroho dan Randi, 2007, hlm.280). Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat. Menurut WHO (dalam Sastropoetro, 1988, hlm. 11) partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pembangunan menggunakan pendekatan partisipatif merupakan pembangunan dari bawah (*bottom-up development*), dengan partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Program kerja PKK di rumuskan dalam 10 Program Pokok PKK. Salah satu program kerja PKK adalah kelestarian lingkungan hidup. Lokasi penelitian yang berada di Kampung Bojongduren Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, program tersebut termasuk ke dalam Pokja III, dari program kelestarian lingkungan hidup tersebut dijabarkan kedalam program yang lebih terperinci salah satunya adalah KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Program tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah untuk di tanami berbagai tanaman sayuran, obat dan buah. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat mulai peduli akan kelestarian lingkungannya. Selain itu, melalui KRPL diharapkan masyarakat

mulai membiasakan diri hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi sayur dan buah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa kegiatan program PKK di Desa Panumbangan pada saat ini diketuai oleh Ibu Yeny Indrawati H, selaku isteri dari Kepala Desa Panumbangan Bapak Yan Mardiyana. Upaya pemerintah untuk menjadikan setiap desa di Kabupaten Sukabumi bisa menjadi desa yang mempunyai prestasi dibidang tertentu dengan cara menjadikan setiap tahun bergiliran menjadi desa percontohan. Pada tahun 2014 Desa Panumbangan ditunjuk sebagai Desa percontohan, hal tersebut menjadi motivasi kader PKK untuk dapat menjadi desa percontohan yang berhasil. Kepengurusan PKK yang dipimpin Ibu Yeny dimulai tahun 2013 dipandang cukup berhasil dan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, terbukti berhasil menjuarai 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Sukabumi dan beberapa penghargaan lainnya di tingkat Kabupaten sampai tingkat Provinsi. Terlebih keberhasilan tersebut sangat terlihat dikarenakan dua periode sebelumnya program kerja PKK dianggap tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh tidak aktifnya kepengurusan kader PKK pada dua periode tersebut. Salah satu program yang menjadi unggulan PKK Desa Panumbangan adalah Program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Kader PKK bertugas mensosialisasikan, mengarahkan, dan membimbing masyarakat supaya sadar dan mulai mencintai lingkungannya melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk dijadikan lahan bercocok tanam.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari hanya difokuskan di RW 05 Kampung Bojongduren. Wilayah rw tersebut dijadikan tempat pembibitan dan pengelolaan program KRPL, hal tersebut menjadikan RW 05 sebagai rw binaan dan rw percontohan. Dekatnya jarak RW 05 dengan kantor desa menjadi salah satu pertimbangan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai Rw percontohan, agar memudahkan para kader untuk mengelola dan mengontrol keberhasilan program tersebut. Keadaan pertumbuhan tanaman di rw tersebut terlihat sangat baik, namun sayangnya keberhasilan program KRPL di RW 05 tidak diikuti oleh RW lainnya. Terlihat sebagian besar pekarangan rumah warga di rw lainnya tidak

mengikuti program dari PKK tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yaitu (1) masyarakat kurang mendapat informasi dan sosialisasi program KRPL; (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan rendahnya pemahaman akan pentingnya program pembangunan untuk kesejahteraan bersama.

Keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh peran kader dan partisipasi masyarakat. Melalui masyarakat, kader mengetahui berbagai potensi dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menentukan program yang akan dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan kepengurusan PKK pada saat ini bukan berarti tidak terdapat kendala dan kelemahan. Berdasarkan hasil identifikasi lanjutan, permasalahan yang ada saat ini adalah program yang dilakukan belum merata, hal tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan belum maksimal dan dalam pelaksanaan belum memenuhi semua kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan program KRPL hanya difokuskan di RW 05 Kampung Bojongduren yang ditunjuk sebagai RW binaan. Jika melihat dari jumlah penduduk Desa Panumbangan sebanyak 5.079 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2015) dan jumlah RW sebanyak 6 RW dan luas wilayah 1.941 Ha maka dapat terlihat bahwa belum meratanya program tersebut.

Melihat berbagai kenyataan dalam pelaksanaan kepemimpinan di dalam organisasi kemasyarakatan perempuan menarik untuk diteliti dimana perlu adanya kajian mengenai peran kepemimpinan dalam organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu studi dengan judul : “Peran Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tergambar bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai peran kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan uraian lebih rinci sebagai berikut:

Choirunnisa Awaliyah, 2015

**PERAN KADER PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Panumbangan di usia produktif masih banyak yang hanya lulusan SD
2. Tingkat pendidikan tersebut berpengaruh kepada rendahnya kesadaran akan pentingnya program pembangunan untuk kesejahteraan bersama
3. Hambatan dalam pelaksanaan program oleh Kader PKK mencakup faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran kader PKK dalam program kawasan rumah pangan lestari (KRPL)?”

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kader dalam perencanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari di Desa Panumbangan?
2. Bagaimana peran kader untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari?
3. Bagaimana gambaran partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari?
4. Bagaimana hasil yang dicapai oleh masyarakat dari program kawasan rumah pangan lestari?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kader PKK dalam program kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Choirunnisa Awaliyah, 2015

PERAN KADER PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Mengetahui perencanaan kader untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari di Desa Panumbangan.
- b. Mendeskripsikan gambaran partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari
- c. Mengetahui peran kader untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kawasan rumah pangan lestari
- d. Mengetahui hasil yang dicapai oleh masyarakat dari program kawasan rumah pangan lestari

E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa PLS tentang pendidikan masyarakat melalui program PKK dan dapat di jadikan sebagai referensi dalam proses pelaksanaan program PKK.

2. Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap peran kader PKK dalam mensukseskan 10 Program Kerja PKK dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan peneitian dan Struktur Organisasi Skripsi
- BAB II : Kajian Pustaka yang di dalamnya membahas beberapa Teori dan Konsep mengenai Peran Kader PKK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi rancangan alur penelitian dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang

Choirunnisa Awaliyah, 2015

PERAN KADER PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digunakan, tahapan pengumpulan data hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

BAB IV : Temuan dan Pembahasan, berisi tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran terhadap pelaksanaan program PKK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.